

ABSTRAK

Ichwanul Syahfitri Tri Putri Sentosa, *Konflik Sosial di Maluku Tahun 1999-2002: Peran Pela Gandong Sebagai Mekanisme Resolusi Konflik (Studi Kasus Kerusuhan Sosial di Batu Merah-Mardika, Kota Ambon)*. Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2026.

Pada penelitian mengenai konflik sosial di Ambon tahun 1999-2002, akan membahas dua permasalahan yaitu, tentang latar belakang terjadinya Konflik Ambon 1999–2002 dan peran Pela Gandong dalam proses penyelesaian dan rekonsiliasi konflik. Konflik Ambon yang meletus pada 19 Januari 1999 bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil ketegangan struktural yang sudah lama mengendap.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sejarah. Pendekatan pada penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan tahapan penelitian sejarah sebagai berikut, pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Buku, artikel jurnal, website dan wawancara.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, faktor utama penyebab konflik meliputi perubahan demografi akibat migrasi massal pendatang Sulawesi (Buton, Bugis, Makassar) melalui program transmigrasi Orde Baru, karena hal ini terjadi ketimpangan sosial-ekonomi antara penduduk asli dan pendatang. Krisis moneter 1997–1998 juga semakin memperparah kesenjangan ekonomi ini. Selain itu segregasi pemukiman berdasarkan agama dan polarisasi identitas, serta melemahnya mekanisme integrasi adat semakin memperparah situasi. Transisi politik pasca-kejatuhan Soeharto pada 1998 menciptakan kekosongan kekuasaan dan melemahkan aparat keamanan, sehingga insiden kecil di terminal Batu Merah dengan cepat meluas menjadi kekerasan terbuka yang bermotif agama.

Di tengah kehancuran tersebut, Pela Gandong muncul sebagai salah satu instrumen resolusi konflik dan rekonsiliasi yang paling efektif. Sebagai sistem persaudaraan adat lintas agama, Pela Gandong sempat melemah selama konflik berlangsung. Namun, setelah Perjanjian Malino II di bulan Februari 2002, tradisi ini kemudian dihidupkan kembali melalui berbagai upacara seperti Panas Pela. Nilai-nilai inti seperti "ale rasa beta rasa" (apa yang kamu rasa, saya juga merasakannya), solidaritas, gotong royong, dan toleransi lintas agama menjadi fondasi pemulihan hubungan antar-komunitas. Pela Gandong berhasil melengkapi pendekatan formal pemerintah dengan pendekatan budaya yang lebih menyentuh masyarakat hingga ke akar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kerusuhan Ambon terjadi bukan hanya karena konflik agama saja, namun merupakan puncak dari konflik akibat faktor-faktor yang terjadi sebelumnya, dan di tengah kehancuran tersebut Pela Gandong berhasil memulihkan hubungan masyarakat dengan pendekatan kebudayaan lokal.

Kata Kunci: Kerusuhan Ambon, Konflik Sosial Ambon, Peran Pela Gandong Dalam Konflik Ambon

ABSTRACT

Ichwanul Syahfitri Tri Putri Sentosa, *Konflik Sosial di Maluku Tahun 1999-2002: Peran Pela Gandong Sebagai Mekanisme Resolusi Konflik (Studi Kasus Kerusuhan Sosial di Batu Merah-Mardika, Kota Ambon)*. Yogyakarta: Department of History, Faculty of Letters, Sanata Dharma University, 2026.

This study on the social conflict in Ambon from 1999 to 2002 will address two issues: the background of the 1999–2002 Ambon Conflict and the role of Pela Gandong in the conflict resolution and reconciliation process. The Ambon Conflict, which erupted on January 19, 1999, was not an event that emerged suddenly, but rather the result of long-simmering structural tensions.

This study employs a qualitative historical method. The research approach follows the stages of historical research as follows: topic selection, source collection, verification, interpretation, and historiography (the writing of history). The sources used in this study include books, journal articles, websites, and interviews.

The research findings indicate that the main factors causing the conflict include demographic changes resulting from the mass migration of Sulawesi settlers (Buton, Bugis, Makassar) through the New Order's transmigration program, which led to socioeconomic disparities between the indigenous population and the settlers. The 1997–1998 monetary crisis further exacerbated these economic disparities. Furthermore, residential segregation based on religion, the polarization of identities, and the weakening of traditional integration mechanisms further exacerbated the situation. The political transition following Suharto's fall in 1998 created a power vacuum and weakened security forces, allowing a minor incident at the Batu Merah terminal to quickly escalate into open, religiously motivated violence.

Amid the devastation, Pela Gandong emerged as one of the most effective instruments of conflict resolution and reconciliation. As an interfaith traditional kinship system, Pela Gandong had weakened during the conflict. However, following the Malino II Agreement in February 2002, this tradition was revived through various ceremonies such as Panas Pela. Core values such as “ale rasa beta rasa” (what you feel, I feel too), solidarity, mutual aid, and interfaith tolerance became the foundation for restoring relations between communities. Pela Gandong successfully complemented the government's formal approach with a cultural approach that resonated deeply with the community at its very roots. Thus, it can be concluded that the Ambon riots did not occur solely because of religious conflict, but were the culmination of conflicts stemming from prior factors; and amidst that devastation, Pela Gandong succeeded in restoring community relations through a local cultural approach.

Keywords: Ambon Riots, Social Conflict in Ambon, The Role of Pela Gandong in the Ambon Conflict